

Pangan Rakyat :

SOAL HIDUP ATAU MATI

60 Tahun Kemudian

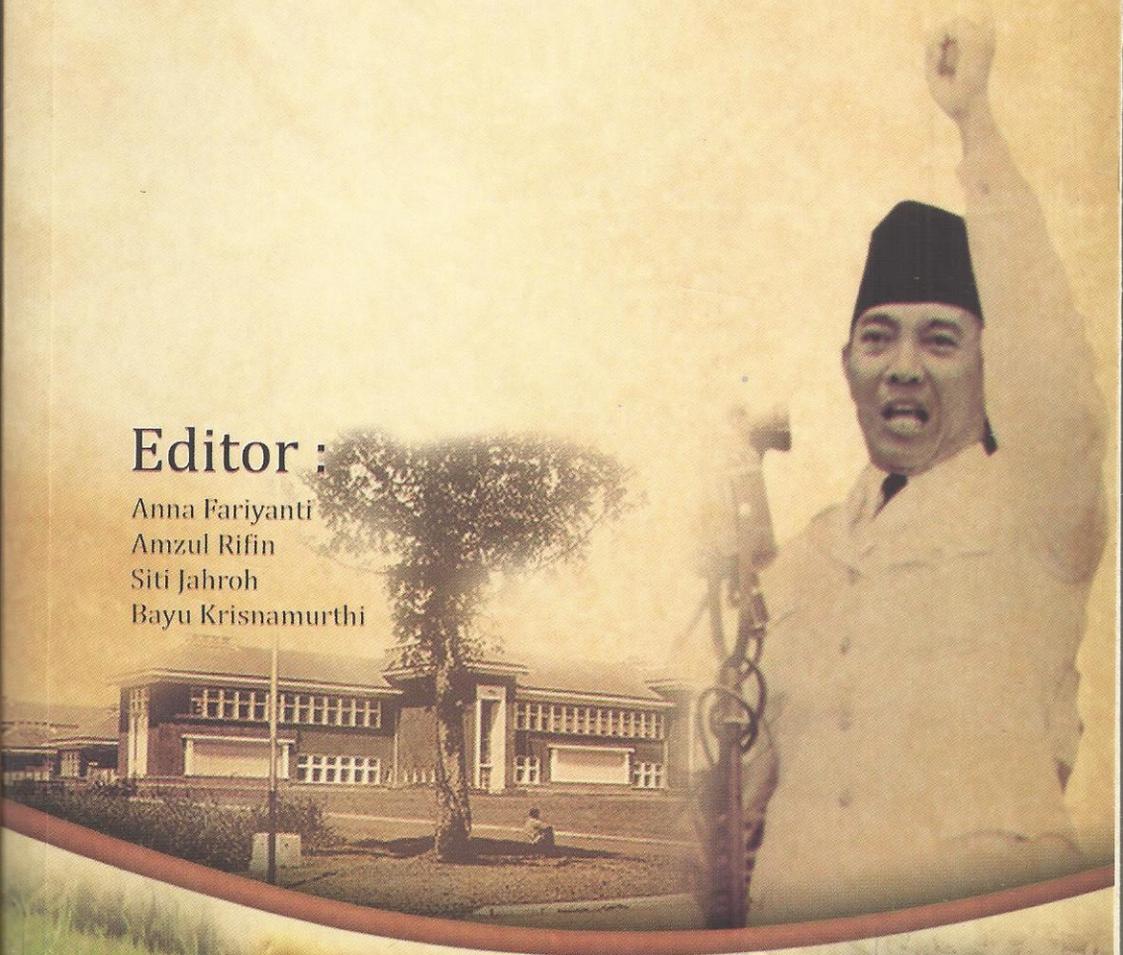
Editor :

Anna Fariyanti

Amzul Rifin

Siti Jahroh

Bayu Krisnamurthi



Pangan Rakyat :

SOAL HIDUP ATAU MATI

60 Tahun Kemudian

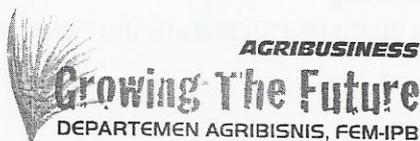
**Refleksi Pidato Bung Karno pada Peletakan Batu
Pertama Kampus IPB Baranangsiang**

Pangan Rakyat :
SOAL HIDUP ATAU MATI
60 Tahun Kemudian

**Refleksi Pidato Bung Karno pada Peletakan Batu
Pertama Kampus IPB Baranangsiang**

Tim Editor :

Anna Fariyanti
Amzul Rifin
Siti Jahroh
Bayu Krisnamurthi



PANGAN RAKYAT : SOAL HIDUP ATAU MATI 60 TAHUN KEMUDIAN

Tm Penulis

Tim Editor :

Anna Fariyanti

Amzul Rifin

Siti Jahroh

Bayu Krisnamurthi

Copyright© 2012 Departemen Agribisnis, FEM-IPB dan PERHEPI

Desain Cover : Hamid Jamaludin Muhrim
Dede Mulia Yusuf
Foto Cover : Google & Petrus Suryadi
Layout : Dede Mulia Yusuf
Penerbit : Departemen Agribisnis, FEM - IPB
dan PERHEPI
Terbitan Pertama : April 2012
Dicetak Oleh : Safa Printing, Jakarta
Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KTD)

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

ISBN : 978-979-19423-6-2



PANGAN RAKYAT : SOAL HIDUP ATAU MATI

DR. BAYU KRISNAMURTHI

Dosen Departemen Agribisnis - FEM IPB,
Ketua Umum PP. PERHEPI dan Wakil Menteri Perdagangan RI

Pada peletakan batu pertama pembangunan Gedung Fakultas Pertanian Universitas Indonesia - yang kemudian menjadi Institut Pertanian Bogor - Presiden RI pertama Sukarno menyampaikan sebuah pidato yang sangat penting dan bersejarah yang diberi judul "*Soal Hidup atau Mati*". Pidato tanggal 27 April 1952 itu (yang menjadi tulisan pembuka dalam buku ini) mengemukakan arti penting penyediaan makanan bagi rakyat. Sedemikian pentingnya sehingga Bung Karno menyebut persoalan pangan sebagai 'persoalan hidup atau mati' bangsa ini.

Paling tidak terdapat tiga aspek penting dari pidato itu. Pertama, penekanan pada urgensi permasalahan yang dihadapi. Pangan atau makanan benar-benar merupakan hal yang sangat mendesak dan harus berada pada prioritas tertinggi. Kedua, rincian perhitungan dan logika teknis yang diajukan. Pidato yang dapat dikategorikan sebagai pidato politik - karena disampaikan oleh seorang Presiden - memiliki dimensi teknis yang kuat. Hal ini mengisyaratkan bahwa urusan pangan memang harus diselesaikan secara teknis dan membutuhkan komitmen dan keputusan politik yang kuat; tidak dapat hanya salah satunya saja. Ketiga, solusi yang diajukan untuk mengatasi masalah besar itu. Pidato soal hidup mati bangsa itu tidak berisi janji janji program atau rencana apa yang akan dilakukan pemerintah, tetapi penuh dengan ajakan kepada kaum muda untuk menjawab permasalahan bangsa. Pidato Presiden tersebut juga bermakna bahwa penyelesaian persoalan pangan diamanatkan kepada pengembangan pendidikan tinggi pertanian. Persoalan pangan adalah persoalan yang lalu, persoalan hari ini, dan persoalan yang akan datang. Karena itu sangatlah tepat apabila pendidikan tinggi pertanian menjadi tumpuan harapan penyelesaian

masalah tersebut.

Enam puluh tahun sejak pidato itu dikumandangkan, permasalahan pangan tampaknya masih relevan sebagai salah satu prioritas utama yang dihadapi bangsa Indonesia. Urgensinya menjadi bertambah mendesak karena faktor perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya alam serta peningkatan jumlah penduduk. Meskipun dalam arti yang berbeda dengan 60 tahun lalu, tidak berlebihan jika pada dekade kedua abad 21 ini persoalan pangan masih tetap dapat dibaratkan sebagai "persoalan hidup mati".

Buku ini yang merupakan bunga rampai pemikiran dari penulis dengan berbagai latar belakang profesi dan pendidikan, disajikan dengan bahasa yang sangat luas dan sederhana memberikan tanggapan terhadap tantangan yang diberikan oleh Bung Karno 60 tahun yang lalu.

Relevansi pidato Bung Karno diangkat secara luas dan ditempatkan dalam kerangka politik ekonomi - bahkan dalam kerangka paradigma berpikir - yang aktual. Pangan sebagai persoalan hidup mati bangsa kiranya tidak akan berhenti pada suatu masa saja, tetapi akan tetap menjadi masalah bangsa yang perlu dijawab sepanjang masa. Sekali kita lengah maka masalah tersebut dapat menjerumuskan bangsa kita pada situasi yang tidak diinginkan.

Semangat untuk menjawab tantangan permasalahan yang sama pada kondisi yang aktual juga ditunjukkan oleh para penulisa yang memberikan kontribusi tulisannya. Beragamnya usulan dan pemikiran menunjukkan kompleksitas permasalahan pangan dan dinamika tantangan yang dihadapi. Pangan saat ini bukan hanya sekedar jumlah atau jenis, tetapi juga menyangkut kualitas, ketersediaan sumberdaya, kondisi kehidupan petani, perkembangan teknologi yang tidak berhenti, politik ekonomi dan berbagai dimensi sosial kemasyarakatan yang jalin menjalin dalam saling ketergantungan yang dalam. Seberapa kecilpun aspek yang diajukan memiliki potensi untuk memberi kontribusi solusi - atau tambahan masalah - menjaga ketersediaan pangan untuk rakyat.

Itulah sebabnya tulisan ini seolah merupakan 'rajutan kain perca' yang mencoba memberikan kontribusi ditengah-tengah keinginan bangsa ini

untuk lebih mandiri dalam menyelesaikan permasalahan pangannya. Perlu dicermati bahwa tulisan ini merupakan kumpulan tulisan dari penulis pemula dan penulis senior yang dari segi pengalaman memiliki jam terbang yang berbeda. Setiap penulis memiliki gaya bahasa sendiri dalam menyampaikan pemikirannya. Hal ini bukanlah "mengecilkan peran dan kontribusi" penulis senior. Namun lebih kepada bagaimana kita menggali ilmu dari berbagai sumber, terutama para generasi muda. Sehingga dengan harapan bahwa buku ini, diharapkan mampu membangkitkan semangat 60 tahun lalu yang disampaikan oleh sang visioner untuk kita mampu berdikari dan mandiri dalam pemenuhan pangan rakyat.

Bogor, April 2012

KEBANGKITAN PENDIDIKAN PERTANIAN 60 TAHUN KEMUDIAN

PROF. DR. IR. HERRY SUHARDIYANTO, M.SC

Rektor Institut Pertanian Bogor

Menyimak dan merenungkan pidato Bung Karno 60 tahun lalu pada saat peletakan batu pertama Fakultas Pertanian, Universitas Indonesia pada tanggal 27 April 1952, kita mendapat kesan bahwa pidato itu sangat tegas dan visioner. Pidato itu telah membangkitkan semangat generasi muda pada saat itu. Presiden Soekarno menyampaikan pidatonya yang berjudul Pangan Rakyat Soal Hidup atau Mati. Setelah 60 tahun pidato tersebut, esensi dari pidato tersebut masih sangat relevan dengan keadaan bangsa Indonesia pada saat ini. Paparan dan solusi masalah yang disampaikan dalam pidato tersebut masih relevan sampai saat ini.

Pada awal pidatonya, Presiden Soekarno menyinggung pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sehingga kebutuhan pangan akan semakin meningkat pula sedangkan peningkatan produktivitas tidak sebesar peningkatan pertumbuhan penduduk. Di sisi lain, dengan angka konsumsi per kapita per tahun pada saat itu jelas bahwa kebutuhan kalori masih belum tercukupi. Selanjutnya Bung Karno mengajukan solusi untuk menanggulangi masalah pangan tersebut yaitu dengan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi. Pada kegiatan ekstensifikasi, Bung Karno menyebutkan masih banyak lahan-lahan yang produktif terutama di luar Jawa yang masih belum digunakan secara optimal, sedangkan untuk kegiatan intensifikasi Bung Karno menyarankan perbaikan cara bercocok tanam sehingga dapat meningkatkan produktivitas.

Salah satu pemikiran visioner yang tergambar dari pidato itu adalah perlunya perencanaan jangka panjang. Bung Karno menyatakan dengan sangat tegas bahwa masalah pangan hanya dapat diselesaikan



oleh para ahlinya. Ahli disini adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang baik dan dibangun melalui pendidikan pertanian dan pangan. Bung Karno tidak mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah pangan saat itu, tetapi mempersiapkan generasi muda dengan pendidikan pertanian dan menggugah kesadaran akan pentingnya pangan sehingga masalah kelangkaan pangan tidak berulang lagi pada masa depan. Dengan pendidikan pertanian ini, akan dihasilkan teknik budidaya yang baik, inovasi teknologi pertanian, dan berbagai pemikiran sebagai dasar kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Hal inilah yang mengajak kita perlu meneguhkan kembali pentingnya pendidikan pertanian sebagai upaya memperkuat ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.

Saya menyambut baik terbitnya buku ***Pangan Rakyat: Soal Hidup atau Mati 60 Tahun kemudian***. Buku ini sangat penting untuk kita semua agar dapat terus menjaga semangat "Kampus Baranangsiang 60 tahun lalu" serta menjawab tantangan Bung Karno saat itu. Buku yang berisi kumpulan pemikiran dari lintas generasi dan profesi ini perlu diapresiasi sebagai kontribusi untuk memecahkan permasalahan pangan dan pertanian yang kita hadapi.

Saya mengucapkan terimakasih kepada Dr. Bayu Krisnamurthi (Wakil Menteri Perdagangan RI, Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI), dan Dosen FEM IPB) yang bekerjasama dengan Departemen Agribisnis FEM IPB untuk menginisiasi penulisan dan penerbitan buku ini. Terimakasih disampaikan kepada seluruh penulis yang telah memberikan kontribusi pemikiran dan ide melalui tulisan dan juga tim editor (Dr. Anna Fariyanti, Dr. Amzul Rifin, Siti Jahroh, PhD dan Dr. Bayu Krisnamurthi) yang mempersiapkan buku ini menjadi buku yang inspiratif. Terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak lain yang baik secara langsung maupun tidak langsung membantu dalam penulisan buku ini.

Jayalah IPB Kita...!



PENGANTAR EDITOR

Pada peletakan batu pertama Fakultas Pertanian, Universitas Indonesia (sekarang telah menjadi Institut Pertanian Bogor) pada tanggal 27 April 1952 Presiden Soekarno menyampaikan pidatonya yang berjudul Pangan Rakyat Soal Hidup atau Mati. Setelah 60 tahun pidato tersebut, esensi dari pidato tersebut masih sangat relevan dengan keadaan bangsa Indonesia saat ini. Buku ini merupakan kumpulan pemikiran dari para pemerhati masalah pangan Indonesia yang terdiri dari berbagai kalangan baik dosen, pengambil kebijakan, peneliti maupun mahasiswa baik program sarjana sampai pascasarjana.

Urutan penulisan dalam buku ini dibagi menjadi lima bagian yaitu pendahuluan, teknologi, inovasi dan produksi pangan, diversifikasi pangan, ekonomi dan kebijakan pangan serta kelembagaan pangan. Pada bagian pendahuluan diawali dengan pidato Presiden Soekarno yang berjudul Pangan Rakyat Soal Hidup atau Mati. Ulasan mengenai pidato Presiden Soekarno 60 tahun yang lalu dan bagaimana relevansinya dengan masalah pangan yang kita hadapi saat ini sampai ke depan menjadi tulisan pada bagian ini.

Pada bagian kedua buku berisi mengenai teknologi, inovasi dan produksi pangan. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana peran teknologi, inovasi dan produksi pangan. Penulisan tidak hanya memfokuskan pada padi tetapi juga memberikan porsi pada pemanfaatan lahan pekarangan, maupun pakan ikani yang menunjang ketahanan pangan.

Selanjutnya pada bagian ketiga mengenai diversifikasi pangan dijelaskan berbagai ragam diversifikasi pangan yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun gizi. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun gizi diperlukan strategi untuk mewujudkannya.

Bagian keempat dibahas mengenai ekonomi dan kebijakan yang berkaitan dengan pangan. Kebijakan fiskal, kebijakan harga output maupun input serta investasi dijabarkan dalam bagian ekonomi dan kebijakan pangan.

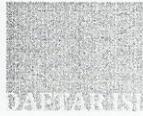


Pada bagian akhir buku ini menjelaskan mengenai kelembagaan pangan. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana peran kelembagaan dalam kaitannya dengan masalah pangan seperti kelembagaan pangan di peredesaan, misalnya mengenai kelembagaan agraria, koperasi, primatani, gerakan pemuda cinta pertanian dan kelembagaan pendidikan tinggi yang berhubungan dengan masalah pangan.

Dari kumpulan tulisan ini dapat disimpulkan bahwa pidato Presiden Soekarno 60 tahun yang lalu masih sangat relevan dengan masa sekarang. Masalah yang dihadapi 60 tahun masih relatif sama dengan saat ini yaitu bagaimana memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Dengan buku ini terdapat berbagai sumbangan pemikiran bagaimana memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia pada konteks saat ini.

DAFTAR ISI

SOAL HIDUP ATAU MATI	1
Sukarno	
SEBUAH PIDATO YANG VISIONER.....	19
Sjamsoe'oad Sadjad	
PANGAN RAKYAT SOAL HIDUP DAN MATI : REFLEKSI POLITIK PANGAN BANGSA.....	39
Rudi Wibowo	
REVOLUSI PANGAN DIMULAI DARI REVOLUSI CARA BERFIKIR TENTANG PANGAN	51
Darsono	
MEMBUMIKAN KEBIJAKAN PANGAN NASIONAL	73
Bustanul Arifin	
PANGAN UNTUK RAKYAT : MELAWAN KETERCERABUTAN DAN IRASIONALITAS.....	91
Darmawan Salman	
GUREMISASI DAN SYARAF PSIKO-SOSIAL TRANSFORMASI INDONESIA.....	103
Agus Pakpahan	
PERAN KEWIRAUSAHAAN MENJAWAB TANTANGAN HIDUP ATAU MATI.....	111
Feryanto dan Burhanuddin	
INOVASI SEBAGAI PENGELAK "TODONGAN PISTOL" MASALAH PANGAN.....	125
Sudi Mardianto	
MANAJEMEN LANSKAP PEKARANGAN BAGI KETAHANAN PANGAN KELUARGA.....	147
Hadi Susilo Arifin	
PANGAN IKANI, PANGAN RAKYAT NEGARA KEPULAUAN.....	173
Indra Jaya	
KELAPA SAWIT PENYEDIA PANGAN DAN PENYOKONG KEHIDUPAN BANGSA	185
Erliza Hambali dan Mira Rivai	



PANGAN DAN ENERGI DALAM PERSPEKTIF GLOBAL DAN PEMBANGUNAN PANGAN LOKAL	201
Rahim Darma	
PERTANIAN PADI INDONESIA (MASALAH DAN SOLUSINYA)	219
Zulfahrizal	
KETAHANAN PAKAN UNTUK MENUNJANG KETAHANAN PANGAN	239
Irma Badarina	
DIVERSIFIKASI PANGAN : STRATEGI KETAHANAN PANGAN DALAM UPAYA MEMENUHI KEBUTUHAN PANGAN RAKYAT	253
Tien R. Muchtadi dan Yuli Sukmawati	
OPTIMALISASI DIVERSIFIKASI PANGAN GUNA MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL YANG BERKELANJUTAN	273
Budi I. Setiawan	
DIVERSIFIKASI PANGAN DALAM PEMENUHAN GIZI DAN KESEHATAN: HAK ASASI BAGI KELANGSUNGAN HIDUP MANUSIA	289
Clara Meliyanti Kusharto	
DIVERSIFIKASI PANGAN; MUDAH TAPI SULIT	311
Netti Tinaprilla	
AKSELERASI DIVERSIFIKASI PANGAN SALAH SATU UPAYA DALAM MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN	327
Valeriana Darwis	
DUKUNGAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM PENGUATAN KETAHANAN PANGAN INDONESIA	343
Anny Ratnawati	
INVESTASI PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL	367
Yusman Syaukat	
MEMBANGUN KEDAULATAN NEGARA MELALUI KEDAULATAN PANGAN	385
Fuad Hasan	
EFEKTIFITAS KENAIKAN HPP BERAS DAN PROYEKSINYA TERHADAP KEBIJAKAN IMPOR BERAS TAHUN 2012	395
Cicin Yulianti	



MENJAWAB AMANAT BUNG KARNO 27 APRIL 1952 DI BARANANGSIANG BOGOR DALAM PEMENUHAN KEBUTUHAN PANGAN NASIONAL	407
S. Pratiwi, N. Emilia, dan R. Martha	
ALTERNATIF KEBIJAKAN SUBSIDI PADI YANG KOMPREHENSIF	427
A. Faroby Falatehan	
ARAH BARU PENURUNAN KETAHANAN PANGAN: "DERURALIZATION", "DEPEASANTIZATION", "DEAGRARIANIZATION"	449
Endriatmo Soetarto dan Ivanovich Agusta	
PERAN STRATEGIS KELEMBAGAAN PETANI DALAM MENENTUKAN KEBERHASILAN REFORMASI AGRARIA DALAM UPAYA MENJAMIN AKSES PANGAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI MISKIN	461
Manuntun Parulian Hutagaol	
SUMBERDAYA MANUSIA UNTUK PANGAN : TANTANGAN DAN ANTISIPASI.....	477
Arif Satria	
JADIKAN IPB KAMPUS BIODIVERSITAS SEBAGAI TEMPAT PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN ANAK BANGSA YANG BHINNEKA TUNGGAL IKA MENJADI CERDAS, BERAKHLAK DAN BERKARAKTER UNTUK AKTIF DALAM SOAL "HIDUP ATAU MATI" BANGSA	481
Ervizal A.M. Zuhud	
UPAYA Mendukung KETAHANAN PANGAN BERKELANJUTAN MELALUI REVITALISASI PROGRAM PRIMA TANI MENJADI MODEL PENGEMBANGAN PERTANIAN PERDESAAN MELALUI INOVASI (MP3MI) BERBASIS ICT	499
Gunawan dan Sugiyanto	
FAKTOR-FAKTOR PENENTU KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA	515
Nurlatifah, Sri Mulatsih, dan Lukytawati Anggraeni	
KRISIS DAN JAMINAN PANGAN BAGI RAKYAT.....	531
Sucipto	
PANGAN = SOAL HIDUP ATAU MATI.....	545
Rafnel Azhari	



PANGAN VS BIOENERGI	549
Vela Rostwentivaivi Sinaga	
SOLUSI KRISIS PANGAN : UPAYA MENGGERAKKAN SEKTOR PERTANIAN MELALUI GERAKAN PEMUDA CINTA PERTANIAN	559
Resti Yanuar Akhir, Aghnia An'umillah, dan Annisa Sophia	
PROGRAM PERCEPATAN KETAHANAN PANGAN (PPKP): SOLUSI STRATEGIS DALAM MEMBANGUN PERTANIAN INDONESIA	577
Ahmad Sopian, Hadiyansyah Anwar dan Nadilla Ambar Fauziah	
PENERAPAN MANAJEMEN KOPERASI PETERNAK SUSU (KPS) EFEKTIF: SOLUSI DALAM MENANGANI PERMASALAHAN HARGA JUAL SUSU MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN SAPI PERAH	597
Vitalia Putri Asheri, Niken Larasati Abimanyu, dan Jannatin Alfafa	

ARAH BARU PENURUNAN KETAHANAN PANGAN: “DERURALIZATION”, “DEPEASANTIZATION”, “DEAGRARIANIZATION”

ENDRIATMO SOETARTO
IVANOVICH AGUSTA

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
Fakultas Ekologi Manusia IPB

Pendahuluan

President Soekarno has declared that rural area was positive support for development on Indonesia, especially in logistics. Peasants (or Marhaens is Soekarno's idiom) and their agrarian resources were core of this support. Ironically, more than five decades later, Indonesia is going to decrease these supports by three lines: deruralization, depeasantization, and deagrarianization. Special effort should be find to increase rural role on Indonesian development, as well as peasant role and their agrarian resources.

Presiden Soekarno sempat menyatakan pentingnya perdesaan, para petani kecil atau marhaen, dan agraria. Ketiga aspek tersebut terangkai sebagai proses-proses sosial untuk membangun desa-desa di Indonesia.

Jauh hari sebelum kemerdekaan Indonesia, telah disadari bentuk lapisan bawah yang khas di Indonesia, yang disebutnya golongan marhaen (Saksono, 2008). Di samping buruh industri di perkotaan, secara khusus golongan marhaen merujuk pada petani kecil dan buruh tani di perdesaan (Soekarno, 1965).

Dalam Rencana Pembangunan Semesta pada akhir tahun 1950-an, desa menempati peran utama untuk menjaga surplus pangan dan keadilan

sosial. Di dalam desa masih ditemukan berbagai bentuk swadaya masyarakat untuk menghidupi diri mereka sendiri, bahkan bisa terlepas dari campur tangan pemerintah. Kegotongroyongan warga desa dipandang sebagai modal pembangunan untuk mengimbangi persoalan ketimpangan sosial di perkotaan.¹

Menyadari aturan penguasaan lahan menurut Undang-undang Agraria pada masa penjajahan Hindia Belanda (1870) merugikan marhaen, maka aturan baru yang lebih menjamin penghidupan golongan lemah. Dimulai dari peran akademisi serta berbagai panitia bentukan pemerintah untuk menyusun rancangan Undang-undang Agraria tersebut, selanjutnya setelah diusulkan pemerintah dalam sidang parlemen, akhirnya disetujui bentuknya berupa UU Pokok Agraria pada tahun 1960 (Wiradi, 2000).

Setelah lebih dari 60 tahun kemerdekaan, sayangnya, ketiga pokok-pokok berbangsa tersebut justru jatuh sebagai sumber permasalahan di perdesaan. Permasalahan sosial pokok terangkum pada lepasnya peran-peran penting yang bisa dimainkan oleh desa, petani kecil, dan agraria di perdesaan dalam menjaga ketersediaan dan kedaulatan pangan.

Desa 2011

Untuk menyadari besarnya permasalahan perdesaan masa kini, perlu disajikan kondisi desa mutakhir. Menurut data sensus Potensi Desa tahun 2011 terdapat 78.603 desa. Konsep desa mencakup wilayah desa, kelurahan, nagari, dan nama-nama komunitas lain seperti komunitas transmigrasi dan komunitas pra desa lainnya.

Dalam konteks kebutuhan pangan, terdapat 31.791 desa-desa persawahan dan 10.157 desa-desa perladangan (Tabel 1). Desa-desa persawahan mencapai 205.707.540 ha, dan ditinggali oleh 87.798.851 jiwa. Adapun desa-desa perladangan meliputi luasan 74.883.440 ha, dengan jumlah penduduk 21.187.977 jiwa. Wilayah

1 Untuk pandangan Presiden Soekarno lihat Amanat Presiden tentang Pembangunan Semesta Berentjana, Bagian Tertulis yang Disampaikan kepada Depernas, 28 Agustus 1959, halaman 45.



desa-desa persawahan dan perladangan tersebar ke seluruh Indonesia (Gambar 1).

Desa persawahan meliputi desa-desa dengan struktur lahan didominasi persawahan. Desa perladangan meliputi desa-desa dengan struktur lahan didominasi lahan kering. Kedua tipe desa ini didominasi oleh penanaman padi, palawija, dan tanaman pangan lain.

Jika dibandingkan dengan seluruh desa di Indonesia, data-data di atas memperlihatkan bahwa pembicaraan tentang pangan dalam dimensi perdesaan, petani dan agraria mencakup wilayah yang dominan di Indonesia. Di samping itu, pembicaraan pangan juga meliputi peran dari jumlah penduduk yang sangat besar. Pola-pola pengelolaan komunitas pada tataran desa juga menunjukkan lingkup yang sangat luas.

"Deruralization"

Penurunan desa-desa pangan (desa persawahan dan desa perladangan) berlangsung secara konsisten selama hampir satu dekade terakhir. Menurut data Potensi Desa tahun 2003, 2005, 2008, dan 2011, jumlah desa-desa persawahan telah turun dari 70 persen pada tahun 2003 menjadi 40 persen pada tahun 2011 (Gambar 2). Penurunan jumlah desa persawahan, sebanyak hampir separuhnya, menunjukkan turunnya peluang pengelolaan komunitas berbasis ekologi sawah. Penurunan pengelolaan komunitas mengindikasikan menurunnya peran yang bisa dimainkan oleh desa-desa persawahan.

Desa-desa persawahan beralih ekologi menjadi tipe desa lainnya, namun terutama menjadi desa-desa perkebunan (Gambar 3). Peran swasta dan komoditas komersial pada desa perkebunan telah menghilangkan peran desa sebagai sumber pangan dan usahatani bagi warga desa itu sendiri. Penurunan peran desa bagi warganya sendiri dimaknai sebagai *deruralization*.

TABEL 1. Kondisi Desa di Indonesia Tahun 2011

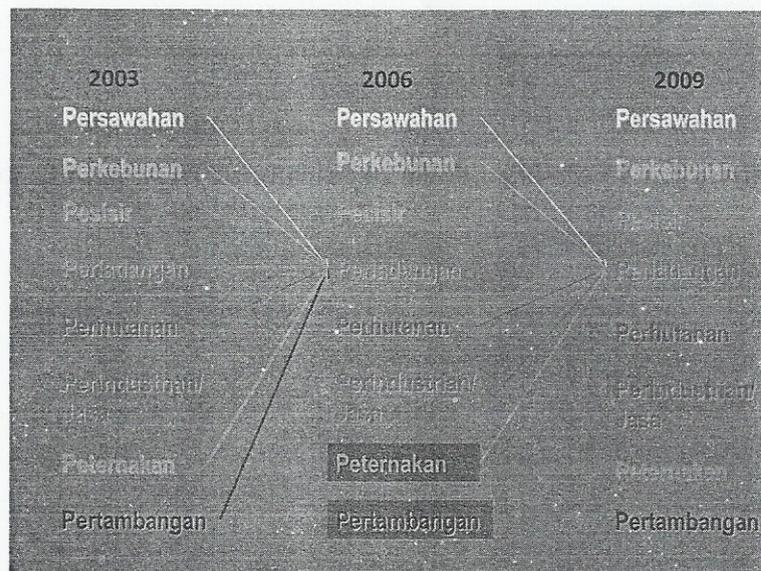
Klasifikasi	Jumlah Nasional	Perhutanan	Perindustrian/ Jasa	Perkebunan	Perladangan	Persawahan	Pertambangan	Pesisir	Peternakan
Jumlah Desa	78,603	2,672	7,665	13,861	10,157	31,791	350	11,879	228
Jumlah Penduduk	238,609,398	2,624,065	73,893,949	23,764,773	21,187,977	87,798,851	1,506,639	27,215,474	617,670
Luas Desa (Ha)	77,955	37,353,430	35,969,160	154,108,820	74,883,440	205,707,540	5,647,730	114,249,570	1,359,100

ENDRIATMO SOEARTO DAN IWANOWICH AGUSTA
PANGGAN RAKYAT: SOAL HIDUP ATAU MATI 60 Tahun Kemudian

**GAMBAR 1.** Tipologi Desa di Indonesia Tahun 2011

pada lokasi-lokasi yang dekat hutan permukimannya berpindah-pindah.

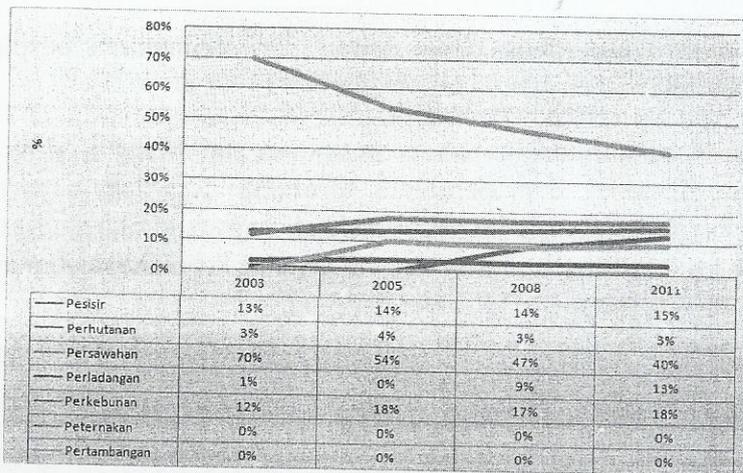
Gambar 4 menunjukkan bahwa desa-desa perladangan yang baru ternyata dibentuk dari peralihan terutama desa-desa peternakan besar. Peralihan fungsi ini menunjukkan bahwa ketika pengelolaan perladangan meningkat, maka muncul peluang kelangkaan pemenuhan ternak-ternak besar.



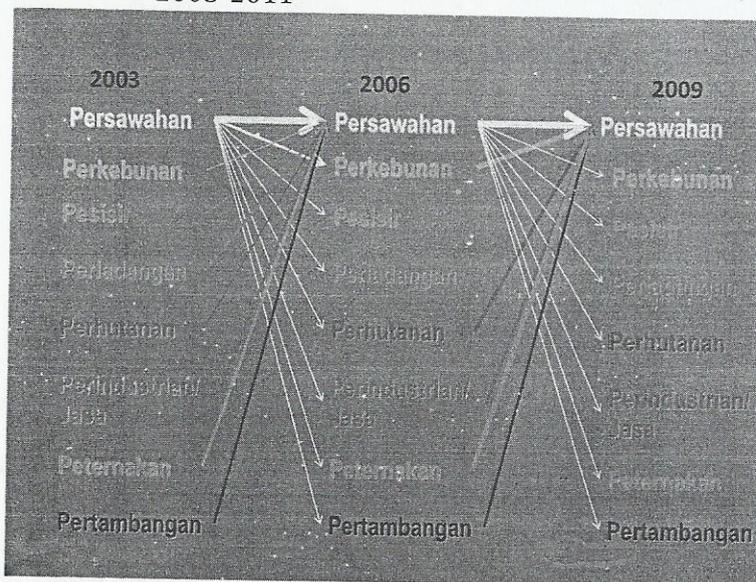
GAMBAR 4. Perubahan Tipe Desa Perladangan Tahun 2003-2009

Untuk melihat kondisi masa ini, Tabel 2 dan Tabel 3 menunjukkan dominasi pengelolaan desa di Jawa-Bali (33 % atau 25.940 desa) dan Sumatera (31 % atau 24.210 desa). Pada taraf yang lebih rendah, pengelolaan desa juga muncul di Sulawesi (13 % atau 9.980 desa). Sisanya tersebar di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Yang mengejutkan, persentase desa persawahan didominasi di Jawa Bali (30 % atau 3.018 desa) dan Papua (28 % atau 2.882 desa). Pada taraf yang lebih rendah, desa persawahan juga muncul di Sumatera (16 % atau 1.563 desa persawahan), Sulawesi (12 % atau 1.181 desa) dan Nusa Tenggara (10 % atau 983 desa). Data terbaru ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap pengelolaan atau pemerintahan atas



GAMBAR 2. Perubahan Jumlah Desa menurut Tipologi Desa Tahun 2003-2011

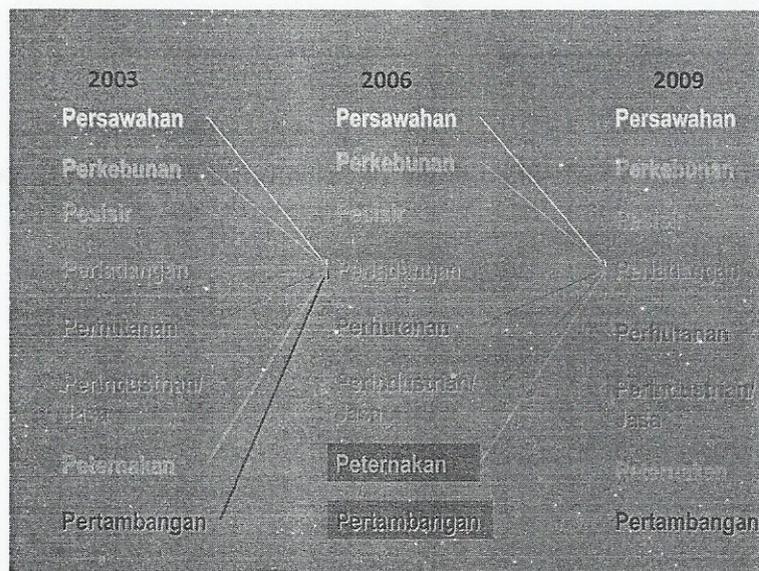


GAMBAR 3. Perubahan Tipe Desa Persawahan Tahun 2003-2009

Berlawanan dari penurunan desa-desa persawahan, persentase desa perladangan meningkat dari satu (1) persen menjadi 13 persen. Pola tersebut mengindikasikan perlunya perhatian dalam pengelolaan komunitas pertanian pangan lahan kering. Komunitas lahan kering dicirikan oleh ikatan sosial yang relatif lebih lemah daripada persawahan, karena pola permukimannya lebih menyebar, bahkan

pada lokasi-lokasi yang dekat hutan permukimannya berpindah-pindah.

Gambar 4 menunjukkan bahwa desa-desa perladangan yang baru ternyata dibentuk dari peralihan terutama desa-desa peternakan besar. Peralihan fungsi ini menunjukkan bahwa ketika pengelolaan perladangan meningkat, maka muncul peluang kelangkaan pemenuhan ternak-ternak besar.



GAMBAR 4. Perubahan Tipe Desa Perladangan Tahun 2003-2009

Untuk melihat kondisi masa ini, Tabel 2 dan Tabel 3 menunjukkan dominasi pengelolaan desa di Jawa-Bali (33 % atau 25.940 desa) dan Sumatera (31 % atau 24.210 desa). Pada taraf yang lebih rendah, pengelolaan desa juga muncul di Sulawesi (13 % atau 9.980 desa). Sisanya tersebar di Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Yang mengejutkan, persentase desa persawahan didominasi di Jawa Bali (30 % atau 3.018 desa) dan Papua (28 % atau 2.882 desa). Pada taraf yang lebih rendah, desa persawahan juga muncul di Sumatera (16 % atau 1.563 desa persawahan), Sulawesi (12 % atau 1.181 desa) dan Nusa Tenggara (10 % atau 983 desa). Data terbaru ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap pengelolaan atau pemerintahan atas

komunitas persawahan perlu disebar terutama di antara Jawa Bali dan Papua.

Untuk desa perladangan, pola pemerintahan didominasi di Sumatera (62 % atau 8.618 desa), jauh melebihi Kalimantan (15 % atau 2.071 desa) dan Sulawesi (13 % atau 1.703 desa). Data tersebut mengindikasikan perlunya perhatian pengelolaan pemerintahan pada desa-desa perladangan di Sumatera.

“Depeasantization”

Penduduk desa-desa pangan (persawahan dan perladangan) tergolong besar (Tabel 4 dan Tabel 5). Secara mengejutkan penduduk desa perladangan tergolong besar di tanah air (sekitar 88 juta atau 37 %). Ternyata lokasi permukiman penduduk desa berikutnya ialah desa-desa pertambangan (31 % atau sekitar 74 juta jiwa). Dari keseluruhan penduduk di desa-desa perladangan, ternyata sebanyak 73 persen atau sekitar 64 juta jiwa terdapat di Jawa dan Bali. Hal ini menunjukkan bahwa status petani padi sawah yang sejak lama dikenal sebagai petani Jawa dan Bali telah merosot, menjadi petani lahan kering. Hal ini sejalan dengan pergerseran lahan persawahan menjadi berbagai peruntukan lahan lainnya.

Jumlah penduduk yang tinggal di atas desa-desa persawahan atau lahan basah telah merosot menjadi hanya sekitar 618 ribu jiwa atau 0,25 persen dari jumlah penduduk di Indonesia. Walaupun data di atas menunjukkan berimbang jumlah desa persawahan di Jawa-Bali dan Papua, namun penduduk yang tinggal di Jawa-Bali mendominasi tipe desa ini. Sebanyak 74 persen atau sekitar 454 ribu penduduk tinggal di desa persawahan di Jawa-Bali.

Angka-angka tersebut mengindikasikan masih dominannya penduduk desa pangan di Jawa dan Bali. Namun demikian, ekologi utama tanaman pangan bukanlah persawahan, melainkan telah menjadi lahan kering. Lazimnya ekologi lahan kering memiliki produktivitas tanaman pangan yang jauh lebih rendah daripada persawahan, sehingga pola baru ini mengindikasikan merosotnya peran penduduk desa dalam menyediakan bahan pangan (*depeasantization*).

TABEL 2. Jumlah Desa di Indonesia menurut Tipologi dan Kelompok Pulau Besar Tahun 2011

KELOMPOK PULAU	TIPOLOGI DESA										TOTAL
	PERHUTANAN	PERKEBUNAN	PERLADANGAN	PERSAWAHAN	PETERNAKAN	PESISIR	PERINDUSTRIAN	PERTAMBANGAN	TOTAL		
SUMATERA	430	1.986	8.618	1.563	9.004	114	2.441	54	24.210		
JAWA-BALI	379	4.340	749	3.018	15.739	48	1.576	91	25.940		
KALIMANTAN	482	434	2.071	451	2.769	111	592	50	6.960		
SULAWESI	246	620	1.703	1.181	2.883	49	3.278	20	9.980		
NUSA TENGGARA	63	169	351	983	1.245	10	1.219	7	4.047		
MALUKU	66	36	151	79	54	2	1.715	0	2.103		
PAPUA	1.006	80	218	2.882	97	16	1.058	6	5.363		
TOTAL	2.672	7.665	13.861	10.157	31.791	350	11.879	228	78.603		

TABEL 3. Persentase Desa di Indonesia menurut Tipologi dan Kelompok Pulau Besar Tahun 2011

KELOMPOK PULAU	TIPOLOGI DESA										TOTAL
	PERHUTANAN	PERKEBUNAN	PERLADANGAN	PERSAWAHAN	PETERNAKAN	PESISIR	PERINDUSTRIAN	PERTAMBANGAN	TOTAL		
SUMATERA	0.55%	2.53%	10.96%	1.99%	11.46%	0.15%	3.11%	0.07%	30.80%		
JAWA-BALI	0.48%	5.52%	0.95%	3.84%	20.02%	0.06%	2.01%	0.12%	33.00%		
KALIMANTAN	0.61%	0.55%	2.63%	0.57%	3.52%	0.14%	0.75%	0.06%	8.85%		
SULAWESI	0.31%	0.79%	2.17%	1.50%	3.67%	0.06%	4.17%	0.03%	12.70%		
NUSA TENGGARA	0.08%	0.22%	0.45%	1.25%	1.58%	0.01%	1.55%	0.01%	5.15%		
MALUKU	0.08%	0.05%	0.19%	0.10%	0.07%	0.00%	2.18%	0.00%	2.68%		
PAPUA	1.28%	0.10%	0.28%	3.67%	0.12%	0.02%	1.35%	0.01%	6.82%		
TOTAL	3.40%	9.75%	17.63%	12.92%	40.45%	0.45%	15.11%	0.29%	100.00%		

TABEL 4. Jumlah Penduduk di Indonesia menurut Tipologi dan Kelompok Pulau Besar Tahun 2011

KELOMPOK PULAU	TIPOLOGI DESA										TOTAL
	Perhutanan	Perkebunan	Perladangan	Persawahan	Peternakan	Pesisir	Perindustrian	Pertambangan			
SUMATERA	341,990.00	3,057,503.00	11,183,275.00	88,205.00	597,418.00	5,455,119.00	15,056,635.00	12,551,188.00	48,331,333.00		
JAWA-BALI	1,157,333.00	12,553,187.00	63,887,974.00	454,238.00	425,203.00	8,853,340.00	2,882,898.00	52,216,199.00	142,430,372.00		
KALIMANTAN	415,022.00	604,913.00	3,724,128.00	49,393.00	298,924.00	2,069,210.00	3,019,678.00	4,090,725.00	14,271,993.00		
SULAWESI	255,426.00	1,593,243.00	5,149,553.00	15,102.00	115,465.00	5,202,215.00	2,115,891.00	3,322,390.00	17,769,285.00		
NUSA TENGGARA	67,527.00	1,564,508.00	3,680,081.00	8,984.00	22,354.00	2,568,156.00	466,946.00	1,013,174.00	9,391,730.00		
MALUKU	41,273.00	60,890.00	57,469.00	0	3990	2,202,881.00	105,519.00	166,681.00	2,638,703.00		
PAPUA	345,494.00	1,753,733.00	116,371.00	1,748.00	43,285.00	864,553.00	117,206.00	533,592.00	3,775,982.00		
TOTAL	2,624,065.00	21,187,977.00	87,798,851.00	617,670.00	1,506,639.00	27,215,474.00	23,764,773.00	73,893,949.00	238,609,398.00		

TABEL 5. Persentase Penduduk di Indonesia menurut Tipologi dan Kelompok Pulau Besar Tahun 2011

KELOMPOK PULAU	TIPOLOGI DESA										TOTAL
	Perhutanan	Perkebunan	Perladangan	Persawahan	Peternakan	Pesisir	Perindustrian	Pertambangan			
SUMATERA	0.1433%	1.2814%	4.6869%	0.0370%	0.2504%	2.2862%	6.3102%	5.2601%	20.26%		
JAWA-BALI	0.4850%	5.2610%	26.7751%	0.1904%	0.1782%	3.7104%	1.2082%	21.8835%	59.69%		
KALIMANTAN	0.1739%	0.2535%	1.5608%	0.0207%	0.1253%	0.8672%	1.2655%	1.7144%	5.98%		
SULAWESI	0.1070%	0.6677%	2.1582%	0.0063%	0.0484%	2.1802%	0.8868%	1.3924%	7.45%		
NUSA TENGGARA	0.0283%	0.6557%	1.5423%	0.0038%	0.0094%	1.0763%	0.1957%	0.4246%	3.94%		
MALUKU	0.0173%	0.0255%	0.0241%	0.0000%	0.0017%	0.9232%	0.0442%	0.0699%	1.11%		
PAPUA	0.1448%	0.7350%	0.0488%	0.0007%	0.0181%	0.3623%	0.0491%	0.2236%	1.58%		
TOTAL	1.0997%	8.8798%	36.7961%	0.2589%	0.6314%	11.4059%	9.9597%	30.9686%	100.00%		

“Deagrarianization”

Luas desa yang didominasi lahan persawahan masih besar, yaitu mencapai desa-desa seluas sekitar 206 juta Ha atau 33 persen. Luasan desa-desa persawahan ini mulai dibayangi oleh desa-desa perkebunan, sekitar 154 juta ha atau 24 persen. Adapun luas desa yang didominasi ekologi perladangan mencapai sekitar 75 juta ha atau 12 persen (Tabel 6 dan Tabel 7).

Dari segi luas lahan, ternyata desa-desa persawahan dominan di Jawa dan Bali (27 % atau sekitar 56 juta ha), Sumatera (27 % atau sekitar 55 juta Ha), dan Kalimantan (25 % atau sekitar 52 juta ha). Sementara itu, luas desa yang didominasi ekologi perladangan dominan di Papua (40 % atau 30 juta ha), jauh di atas desa-desa perladangan di Jawa dan Bali (16 % atau sekitar 12 juta ha).

Data-data sumberdaya agraria ini menunjukkan sumber pangan dari padi sawah muncul terutama di Jawa dan Bali, Sumatera dan Kalimantan. Adapun sumber pangan dari ekologi perladangan terutama bersumber dari Papua. Jika dibandingkan antara dominasi penduduk desa-desa perladangan dan persawahan di Jawa dan Bali, dengan sumberdaya perladangan dominan di Papua, serta persawahan tersebar di Jawa, Bali, Sumatera dan Kalimantan, terlihat indikasi merosotnya penguasaan agraria yang bersesuaian terutama di Jawa dan Bali.

Diskusi

Pembahasan di atas menunjukkan hubungan asimetri antara pengelolaan desa, penduduk desa, dan sumberdaya agraria. Dapat ditunjukkan kembali dominasi jumlah desa persawahan di Jawa-Bali dan Papua. Jumlah penduduk desa persawahan terbesar di Jawa dan Bali. Luas desa-desa persawahan dominan di Jawa dan Bali, Sumatera, dan Kalimantan.

Untuk desa perladangan, pola pemerintahan didominasi di Sumatera. Penduduk desa perladangan dominan terdapat di Jawa dan Bali. Luas desa yang didominasi ekologi perladangan dominan di Papua.

TABEL 6. Luas Desa (Ha) di Indonesia menurut Tipologi dan Kelompok Pulau Besar Tahun 2011

KELOMPOK PULAU	TIPOLOGI DESA										TOTAL
	PERHUTANAN	PERKEBUNAN	PERLADANGAN	PERSAWAHAN	PETERNAKAN	PESISIR	PERINDUSTRIAN	PERTAMBANGAN	TOTAL		
SUMATERA	5.349.280,00	78.985.670,00	8.536.660,00	54.666.080,00	533.520,00	24.537.830,00	9.459.280,00	2.480.800,00	184.549.120,00		
JAWA-BALI	1.679.720,00	1.726.970,00	12.075.390,00	55.864.610,00	262.580,00	7.711.250,00	19.822.990,00	342.210,00	99.485.720,00		
KALIMANTAN	11.423.860,00	54.014.620,00	6.486.740,00	52.353.330,00	330.490,00	11.603.320,00	4.211.700,00	2.109.550,00	142.533.610,00		
SULAWESI	1.556.640,00	9.730.020,00	9.226.820,00	29.464.830,00	45.950,00	14.593.070,00	798.330,00	172.210,00	65.587.870,00		
NUSA TENGGARA	502.640,00	3.728.010,00	6.985.740,00	12.276.920,00	97.980,00	13.983.720,00	178.730,00	6.350,00	37.760.090,00		
MALUKU	2.052.290,00	3.696.740,00	1.605.040,00	210.390	0	28.330.190,00	19.690,00	23.060,00	35.937.400,00		
PAPUA	14.789.000,00	2.226.790,00	29.967.050,00	871.380,00	88.580,00	13.490.190,00	1.478.440,00	513.550,00	63.424.980,00		
TOTAL	37.353.430,00	154.108.820,00	74.883.440,00	205.707.540,00	1.359.100,00	114.249.570,00	35.969.160,00	5.647.730,00	629.278.790,00		

TABEL 7. Persentase Luas Desa di Indonesia menurut Tipologi dan Kelompok Pulau Besar Tahun 2011

KELOMPOK PULAU	TIPOLOGI DESA										TOTAL
	PERHUTANAN	PERKEBUNAN	PERLADANGAN	PERSAWAHAN	PETERNAKAN	PESISIR	PERINDUSTRIAN	PERTAMBANGAN	TOTAL		
SUMATERA	0.85%	12.55%	1.36%	8.69%	0.08%	3.90%	1.50%	0.39%	29.33%		
JAWA-BALI	0.27%	0.27%	1.92%	8.88%	0.04%	1.23%	3.15%	0.05%	15.81%		
KALIMANTAN	1.82%	8.58%	1.03%	8.32%	0.05%	1.84%	0.67%	0.34%	22.65%		
SULAWESI	0.25%	1.55%	1.47%	4.68%	0.01%	2.32%	0.13%	0.03%	10.42%		
NUSA TENGGARA	0.08%	0.59%	1.11%	1.95%	0.02%	2.22%	0.03%	0.00%	6.00%		
MALUKU	0.33%	0.59%	0.26%	0.03%	0.00%	4.50%	0.00%	0.00%	5.71%		
PAPUA	2.35%	0.35%	4.76%	0.14%	0.01%	2.14%	0.23%	0.08%	10.08%		
TOTAL	5.94%	24.49%	11.90%	32.69%	0.22%	18.16%	5.72%	0.90%	100.00%		



Kondisi asimetris dalam desa persawahan mengakibatkan kekurangan lahan persawahan di Jawa. Sementara itu, desa-desa persawahan di Papua mengelola jumlah penduduk yang jauh lebih rendah.

Khusus untuk penduduk desa persawahan di Jawa dan Bali, terdapat kecenderungan beralihnya ke ekologi lahan kering. Namun di sinipun terdapat masalah kekurangan lahan kering, terutama dibandingkan dengan kondisi di Sumatera.

Dengan menyadari berbagai permasalahan masa kini dalam penguatan pengelolaan desa, masyarakat desa dan akses terhadap lahan yang sesuai, rekomendasi yang bisa diajukan berupa penguatan akses lahan persawahan dan perladangan bagi petani. Kemerossotan penguasaan aset lahan, apalagi yang bernilai subur, dapat mengindikasikan peringatan kemerossotan kedaulatan pangan di tanah air. Dari aspek kewilayahan, penguatan pangan seharusnya dititikberatkan di Jawa dan Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Saksono, G. 2008. Marhaenisme Bung Karno Marxisme Ala Indonesia. Ardhana Media.
- Soekarno. 1965. Dibawah Bendera Revolusi, Djilid I. Djakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi.
- Wiradi, G. 2000. Reforma Agraria Perjalanan yang Belum Berakhir. Pustaka Pelajar Offset.